

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
 10. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nomor 760/P3TB/RC.220/VII/2020 tentang Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG NOMOR 760/P3TB/RC.220/VII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG TAHUN 2020-2024**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Renstra Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA** : Renstra Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.
- KEEMPAT** : Kepala Pelabuhan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Teluk Batang
Pada Tanggal : 01 November 2021

Kepala Pelabuhan




Satrio Wibowo, S.St.Pi
NIP.19850726 200901 1 002



**RENCANA STRATEGIS
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga atas berkah dan rahmad Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemampuan serta kesempatan kepada kami untuk menyusun Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan agar membuat rencana strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahun kedepan dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra ini menjadi pedoman umum pelaksanaan fungsi yang diemban dan diamanatkan kepada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang. Renstra disusun mengacu kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024. Terima kasih kami sampaikan atas jerih payah dari semua pihak yang telah berperan serta menyusun dan memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen Renstra ini. Semoga Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dapat melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun sebagaimana Dokumen Renstra ini serta dapat memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan, yang tentunya dengan dukungan dari semua pihak.

Teluk Batang, 1 November 2021
Kepala Pelabuhan,



Satrio Wibowo
Satrio Wibowo, S.St.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	9
C. Lingkungan Strategis.....	12
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	15
A. Visi.....	15
B. Misi	16
C. Tujuan.....	19
D. Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.....	21
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ,.....	23
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	23
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	25
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap.....	33
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	48
E. Kerangka Regulasi	52
F. Kerangka Kelembagaan.....	54
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
A. Target Kinerja	56
B. Kerangka Pendanaan.....	57
BAB V. PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Matriks SWOT Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	14
Tabel 2 : Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2015-2019	6
Gambar 2. Grafik Nilai Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2015-2019	7
Gambar 3. Grafik Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2015-2019.....	9
Gambar 4. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024	23
Gambar 5. Major Project Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	24
Gambar 6. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap	36
Gambar 7. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024	37
Gambar 8. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial Pembangunan Perikanan Tangkap.	46
Gambar 9. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Kerangka kebutuhan Regulasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024	59
Lampiran II	: Matriks Kinerja PPP Teluk Batang Tahun 2020-2024	60
Lampiran III	: Kerangka Pendanaan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024.....	62

BAB I. PENDAHULUAN

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” merupakan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin periode kepemimpinan tahun 2020-2024. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan;
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

A. Kondisi Umum

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang adalah unit organisasi yang berkelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang pengelolaan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang merupakan unit organisasi yang secara langsung mendukung fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembangunan nasional dan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang berkontribusi terhadap pencapaian program dan kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian pembangunan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas. Adapun kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB Perikanan

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, rata-rata laju pertumbuhan PDB perikanan tahun 2015-2019 tercatat minus 5,02 persen per tahun. Laju penurunan terbesar terjadi pada periode tahun 2015-2016 dimana PDB perikanan turun dari 7,89 di tahun 2015 menjadi 5,15 di tahun 2016. Namun demikian terjadi kenaikan kembali di tahun 2017 dimana PDB perikanan tercatat sebesar 5,95. Capaian PDB Perikanan tahun 2017 ini juga merupakan capaian tertinggi pada periode 2016-2019 dimana capaian PDB Perikanan tahun 2018 dan tahun 2018 tercatat sebesar 5,20 dan 5,81. Penurunan laju pertumbuhan PDB perikanan disebabkan oleh penurunan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku sub sektor kelautan dan perikanan dan melemahnya permintaan domestik atas produk perikanan, yang merupakan penggerak utama ekonomi dan pertumbuhan investasi perikanan. Selain itu, penurunan laju pertumbuhan PDB perikanan juga disebabkan karena penerimaan pajak dan belanja pemerintah yang masih tergolong rendah.

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Realisasi NTN tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,74 per tahun. Nilai tukar nelayan di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 dimana tercatat sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), dimana indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan.

Selama tahun 2019, NTN mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga ikan mengalami peningkatan akibat perbaikan kualitas ikan yang diperjualbelikan. Sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) juga mengalami peningkatan sebesar 2,72 persen dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nelayan lebih kecil dibandingkan biaya yang diterima oleh nelayan.

3. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan (RTP) per Bulan

Menurut data kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, realisasi rata-rata pendapatan RTP tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni meningkat sebesar 16,05 per tahun, dimana pada tahun 2015 rata-rata pendapatan RTP tercatat sebesar Rp6,46 juta/bulan menjadi Rp10,65 juta/bulan pada tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan RTP ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan RTP Laut yang juga meningkat cukup tinggi dari Rp8,76 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp13,65 juta/bulan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 15,37%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan RTP Perairan Darat meningkat dari Rp2,13 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp3,57 juta/bulan di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 13,44%.

4. Rata-Rata Pendapatan Nelayan per Bulan

Mengacu pada RTP yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 2015-2019, rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode tahun 2015-2019 dengan peningkatan sebesar 20,54% per tahun. Rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp1,95 juta/bulan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp3,85 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan nelayan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp2,17 juta/bulan menjadi Rp4,10 juta/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,91%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan nelayan perairan darat tercatat sebesar Rp1,49 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp2,47 juta/bulan di tahun 2019 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,34%.

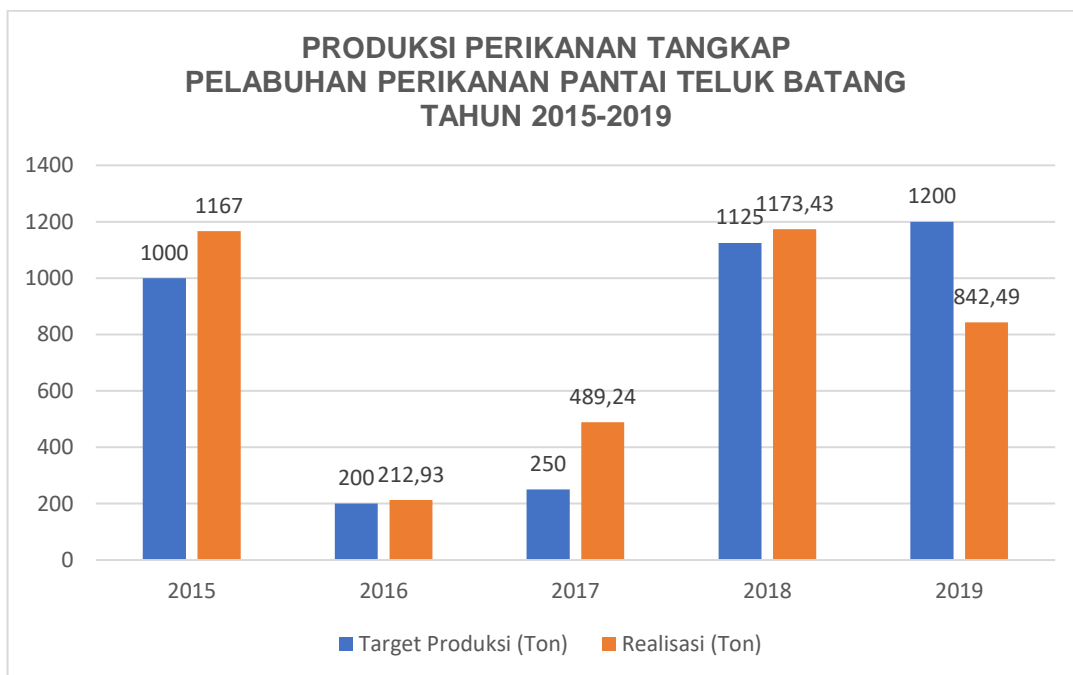
Kenaikan rata-rata pendapatan nelayan ini menunjukkan afirmasi kebijakan untuk program perikanan tangkap telah dapat meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan pada periode tahun 2015-2019. Realisasi pendapatan nelayan berbanding lurus dengan realisasi NTN dimana realisasi rata-rata pendapatan nelayan akan mendukung langsung realisasi NTN pada periode yang sama, sehingga faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian NTN adalah relatif sama dengan faktor rata-rata pendapatan nelayan per bulan.

5. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Salah satu indikator operasional pelabuhan perikanan adalah jumlah produksi perikanan tangkap, indikator tersebut juga menjadi indikator pelaksanaan program dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang. Dalam rentang waktu 2015-2019, realisasi produksi perikanan tangkap yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang fluktuatif dimana pada tahun 2015 target jumlah produksi perikanan tangkap yang di tetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 1.000 Ton dan terealisasi sejumlah 1.167 Ton dengan tingkat capaian 116,7 %. pada tahun 2016 target jumlah produksi perikanan tangkap yang di tetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang lebih rendah dari target dan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 yaitu sejumlah 200 Ton dan terealisasi sejumlah 212,93 Ton dengan tingkat capaian 106,47 %. Terjadinya penurunan target dan penurunan realisasi produktivitas pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang pada tahun 2016 dikarenakan kebijakan mekanisme pendataan, dimana pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang didata dengan menggabungkan data hasil pendaratan ikan dan data distribusi ikan masuk ke Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang baik yang melalui jalur transportasi darat maupun melalui jalur transportasi air, namun pada tahun 2016 mekanisme pendataan dan pencatatan jumlah produksi ikan berdasarkan jumlah ikan yang didaratkan kapal penangkap ikan di dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sehingga jumlah produksi perikanan tangkap yang diangkut dan didistribusikan ke dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dari pelabuhan-pelabuhan lain tidak dapat diakomodir sebagai data produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

Pada tahun 2017 target jumlah produksi perikanan tangkap yang di tetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah 250 Ton dan terealisasi sejumlah 489,24 Ton dengan tingkat capaian 195,70 %. Pada tahun 2018 target jumlah produksi perikanan tangkap yang di tetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang meningkat signifikan dari semula pada tahun 2017 sejumlah 250 Ton menjadi sejumlah 1.125 Ton pada tahun 2018 dan terealisasi sejumlah 1.173,43 Ton dengan tingkat capaian 104,30 %. Sementara pada tahun 2019 target jumlah produksi perikanan tangkap yang di tetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah 1.200 Ton dan terealisasi sejumlah 842,4 Ton dengan tingkat capaian 70,21 %, dimana terjadi penurunan capaian produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang selama tahun 2019 yang disebabkan terjadinya kemarau panjang serta bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Juni 2019 hingga awal

November 2019. Kabut asap yang terjadi pada tahun 2019 mengakibatkan nelayan sulit untuk melaut dikarenakan resiko kehilangan arah sangat tinggi akibat terbatasnya jarak pandang, sehingga banyak nelayan yang memilih tidak melaksanakan aktivitas melaut yang menyebabkan menurunnya produktivitas penangkapan ikan dan pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.



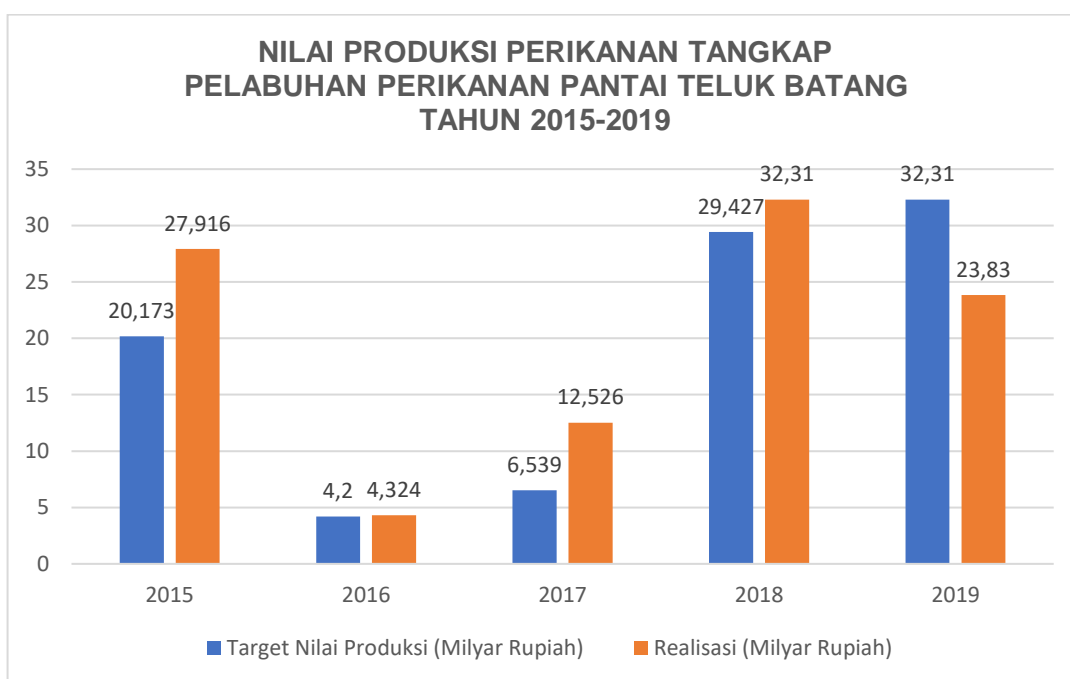
Gambar 1.
Grafik Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2015-2019

6. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Nilai produksi perikanan tangkap dihitung berdasarkan jumlah produksi dikali harga. Harga hasil tangkapan ikan ditentukan berdasarkan jenis ikan dan mutu ikan yang di daratkan. Semakin baik cara penanganan ikan baik di atas kapal, pada saat pendaratan hingga pada pendistribusian maka nilai suatu komoditi akan semakin baik.

Pada tahun 2015, nilai produktivitas perikanan tangkap pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang ditergetkan sejumlah 20,173 Milyar Rupiah dengan realisasi 27,916 Milyar Rupiah sehingga capaiannya sejumlah 138,38 %. Pada tahun 2016, nilai produktivitas perikanan tangkap pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang ditergetkan sejumlah 4,2 Milyar Rupiah dengan realisasi 4,324 Milyar Rupiah dengan persentase 102,95 %. Pada tahun 2017, nilai produktivitas perikanan tangkap pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

ditergetkan sejumlah 6,539 Milyar Rupiah dengan realisasi 12,526 Milyar Rupiah dengan persentase capaian sejumlah 191,56 %. Pada tahun 2018, nilai produktivitas perikanan tangkap pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang ditergetkan sejumlah 29,427 Milyar Rupiah dengan realisasi 32,31 Milyar Rupiah sehingga persentasenya sejumlah 109,80 %. Pada tahun 2019, nilai produktivitas perikanan tangkap pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang ditergetkan sejumlah 32,31 dengan realisasi 23,83 Milyar Rupiah dengan capaian 73,75 %.



Gambar 2.

Grafik Nilai Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2015-2019

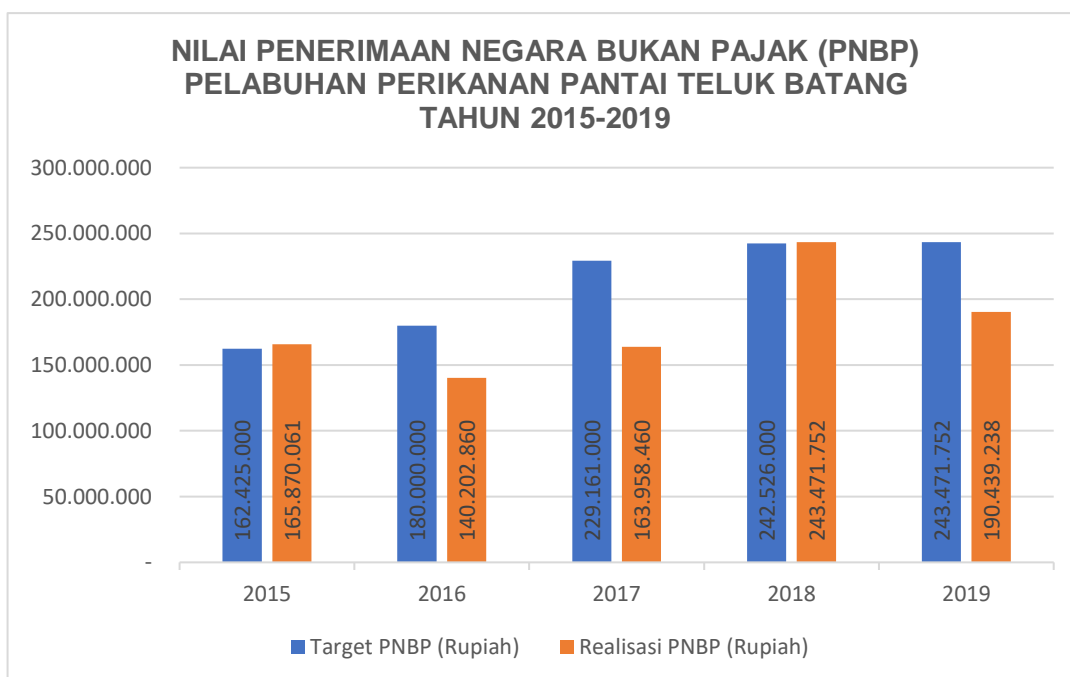
7. Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Indikator yang menjadi parameter pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang adalah nilai capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang menghasilkan PNBP dari kegiatan pelayanan-pelayanan jasa diantaranya Jasa Bengkel, Jasa Pengadaan Air, Jasa Pengadaan Es, Jasa Tambat Labuh Kapal, Jasa Pas Masuk, Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan serta Jasa Penggunaan Peralatan.

Target PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang setiap tahun dipacu untuk terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 target PNBP

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah Rp. 162.425.000,- dan realisasi Rp. 165.870.061,- dengan persentase 102,12 %. Pada tahun 2016 target PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah Rp. 180.000.000,- dan realisasi Rp. 140.202.860,- dengan persentase 77,89 %. Pada tahun 2017 target PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah Rp. 229.161.000,- dan realisasi Rp. 163.958.460,- dengan persentase 71,55 %. Pada tahun 2018 target PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah Rp. 242.526.000,- dan realisasi Rp. 211.616.312,- dengan persentase 87,26 %. Pada tahun 2019 target PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sejumlah Rp. 243.471.752,- dan realisasi Rp. 190.439.238,- dengan persentase 78,22 %.

Pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019, PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dalam penyusunan target PNBP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang selalu dipacu untuk menaikan target pada tiap-tiap tahunnya dengan kata lain terget yang ditetapkan kurang realistis dan tidak mempertimbangkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu belum banyak potensi PNBP yang dapat dikembangkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang salah satunya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan dan kecukupan fasilitas seperti tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang merupakan tanah dalam kondisi belum siap bangun sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal dan berusaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.



Gambar 3.
**Grafik Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Pantai
Teluk Batang Tahun 2015-2019**

Selain indikator-indikator diatas, capaian-capaian yang diraih Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang selama periode 2015-2019 juga meliputi Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang hingga tahun 2019 tercapai 100 %, Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang tercapai sampai dengan tahun 2019 mencapai 100 %. Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang hingga tahun 2019 mencapai 100 %.

Pada periode tahun 2015-2019, Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang juga melaksanakan pengembangan fasilitas yang merupakan program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dilaksanakan di seluruh pelabuhan perikanan termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yaitu pengembangan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) menjadi TPI Higienis yang tidak hanya terjadi peningkatan pada infrastrukturnya namun juga dilakukan pengembangan pada proses dan prosedur pendaratan ikan dan mekanisme penanganan ikan di dermaga dan TPI dengan menerapkan prinsip higienitas tinggi dan memperhatikan sanitas lingkungan sekitar TPI.

B. Potensi dan Permasalahan

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang bertujuan untuk menyediakan layanan, sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat di wilayahnya secara khusus dan secara umum di wilayah pengelolaan perikanan 711. Potensi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

1. Posisi PPP Teluk Batang Strategi, berada pada WPPNRI 711 dan berada pada wilayah DPI Perairan Selat Karimata yang terkenal akan keanekaragaman hayatinya dengan jenis dan jumlah sumberdaya ikan masih berlimpah menjadikan PPP Teluk Batang adalah pelabuhan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. PPP Teluk Batang juga berada di kawasan pengembangan

ekonomi sesuai Rencana Zonasi dan Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara dimana PPP Teluk Batang berada pada kawasan pengembangan pelabuhan.

2. Ketersediaan Lahan, PPP Teluk Batang dioperasikan di atas lahan seluas 5,94 Ha sesuai WKOPP Teluk Batang. Ada $\pm 30\%$ lahan PPP Teluk Batang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana operasional kepelabuhanan. Seluas 20.000 m² atau $\pm 30\%$ lahan diperuntukan sebagai kawasan industri dan perusahaan yang saat ini baru dimanfaatkan seluas 2.452 m² atau 12,26% dan masih menyisakan 17.548 m² lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan investasi. Sisa lahan PPP Teluk Batang yang masih dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana operasional kepelabuhanan $\pm 40\%$ dari luas lahan atau sekitar 23.000 m².
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. PPP Teluk Batang merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang memiliki fasilitas yang mumpuni dengan rasio kecukupan fasilitas mencapai 80%. Seluruh fasilitas pokok yang diperlukan dalam pengoperasian pelabuhan perikanan sepenuhnya telah dimiliki PPP Teluk Batang demikian pula untuk fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
4. Terlindung dari gelombang laut, Letak dan posisi PPP Teluk Batang berada pada tepian sungai dan berada dekat dengan muara sungai serta berhadapan langsung dengan daratan pulau Maya Karimata sehingga relatif terlindung dari gelombang laut secara langsung dan relatif aman bagi kapal yang beraktivitas di PPP Teluk Batang.
5. Hutan Mangrove, Kelestarian hutan mangrove disekitar PPP Teluk Batang menjadi salah satu indikator kelestarian sumberdaya hayati lainnya seperti ketersediaan beberapa jenis molusca seperti kerang-kerangan dan crustacea diantaranya udang, kepiting dan rajungan yang tentunya menjadi potensi yang ada di sekitar PPP Teluk Batang.
6. Sistem Keamanan kawasan PPP Teluk Batang dilaksanakan selama 24 Jam dan 7 hari seminggu dengan jumlah tenaga keamanan yang berkompeten sejumlah 8 orang sehingga menjadikan PPP Teluk Batang adalah wilayah yang terjaga keamanan dan ketertibannya.
7. Jaringan Pemasaran PPP Teluk Batang dilengkapi fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya Dermaga Bongkar Muat, TPI Higienis, Gudang Penyimpanan/Penampungan hasil tangkapan serta pelayanan pembinaan mutu hasil perikanan. Selain itu, terdapat agen-agen penampung yang beraktivitas

di PPP Teluk Batang, hingga tahun 2020 terdapat 3 (tiga) agen penampung hasil perikanan yang aktif menampung dan mendistribusikan hasil tangkapan ikan dari nelayan.

Permasalahan dalam operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem maupun yang berasal dari luar sistem pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang. Permasalahan tersebut yakni sebagai berikut:

1. **Jarak ke Provinsi / Pusat Ekonomi Regional**, lokasi PPP Teluk Batang relatif jauh dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat dengan jarak darat 360 km dan jarak melalui transportasi air mencapai 190 km, hal ini menjadi kelemahan dalam pendistribusian hasil tangkapan ikan, dimana untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPP Teluk Batang ke pusat pemasaran regional di kota Pontianak dibutuhkan waktu hingga 12 jam perjalanan yang tentunya waktu tersebut berdampak terhadap resiko penurunan mutu hasil tangkapan dan memperbesar biaya pendistribusian sehingga menurunkan nilai ekonomis hasil tangkapan.
2. **Jumlah dan Kompetensi SDM**, PPP Teluk Batang memiliki 54 SDM yang terdiri dari 19 Orang PNS dan 35 Orang TKK sehingga berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) PPP Teluk Batang masih kekurangan SDM sejumlah 21. Dari jumlah idealnya 75 Sehingga masih terdapat pegawai yang melaksanakan rangkap tugas dan belum meratanya beban kerja pegawai di PPP Teluk Batang.
3. **Mutu hasil tangkapan / pendaratan ikan rendah**, Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar PPP Teluk Batang belum secara baik menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan ikan yang baik, sehingga mutu hasil tangkapan ikan yang di daratkan di PPP Teluk Batang masih rendah.
4. **Kebutuhan logistik kapal kurang memadai**, belum optimalnya ketersediaan logistik melaut menjadi salah satu kendala nelayan untuk berkunjung dalam rangka mengisi perbekalan di PPP Teluk Batang. Kebutuhan melaut seperti Air dan Es sudah tersedia di PPP Teluk Batang, namun untuk kebutuhan bahan pokok dan BBM belum dapat disalurkan dari dalam PPP Teluk Batang.
5. **Akses Permodalan**, Pengembangan usaha penangkapan ikan di PPP Teluk Batang dan sekitarnya terkendala akses permodalan, jumlah lembaga keuangan minim dan daya jual nelayan yang rendah disebabkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan yang rendah terhadap nelayan. Kurangnya legalitas aset yang dimiliki nelayan menjadi pertimbangan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit usaha. Sebagian besar nelayan di PPP Teluk Batang tidak memiliki

dokumen valid kepemilikan kapal perikanan sehingga aset yang dimiliki nelayan tidak dapat menjadi nilai agunan dalam pengajuan kredit usaha.

6. **Jumlah Investasi / Pelaku Usaha**, PPP Teluk Batang selayaknya menjadi pusat kegiatan bisnis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayahnya, namun hal tersebut masih terkendala dengan jumlah pelaku usaha yang beraktivitas di dalam PPP Teluk Batang. Minimnya jumlah pelaku usaha di PPP Teluk Batang disebabkan minimnya sarana usaha yang tersedia di PPP Teluk Batang seperti lahan yang siap bangun serta gudang/tempat penyimpanan dan pengolahan ikan, sehingga kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan khususnya di Teluk Batang tidak terfokus pada PPP Teluk Batang melainkan terdapat juga di beberapa daerah tangkahan di sekitar PPP Teluk Batang.
7. **Koperasi dan KUB tidak berkembang**, hingga tahun 2020 hanya terdapat 1 unit Koperasi yang beraktivitas di PPP Teluk Batang dan belum terdapat KUB yang terdaftar beraktivitas di PPP Teluk Batang.

C. Lingkungan Strategis

Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis. Faktor lingkungan strategis sebagai daya dukung eksistensi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dalam melaksanakan fungsi sebagai pelabuhan perikanan.

Adapun faktor-faktor lingkungan strategis yang mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang didukung dengan regulasi-regulasi baik yang diterbitkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang juga didukung pendanaan anggaran dari APBN.
2. Program Bantuan Nelayan, beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gencar dalam menyalurkan bantuan kepada nelayan dalam bentuk pendanaan maupun sarana produksi berupa kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang tentu saja hal tersebut menjadi bukti nyata pentingnya sektor kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap untuk terus dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya demi ketersediaan kebutuhan ikan bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
3. Fishing Ground relatif dekat. Perairan Selat Karimata yang berada pada WPPNRI 711 merupakan salah satu fishing ground yang terkenal akan kekayaan

sumberdaya hayatinya, berbagai jenis biota laut terdapat di perairan Selat Karimata yang potensinya masih sangat menjanjikan dan jaraknya dari Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang relatif dekat.

4. Potensi Sumber Daya Ikan di WPP 711, WPPNRI 711 merupakan salah satu WPP yang berstatus masih lestari. Pada WPPNRI 711 banyak terdapat Daerah Penangkapan Ikan yang menyediakan sumberdaya ikan yang beraneka ragam mulai dari berbagai jenis ikan pelagis seperti Kembung, Bawal, Tongkol, Tenggiri dan lainnya, berbagai jenis ikan demersal ekonomis tinggi diantaranya beberapa jenis ikan Kakap, Kerapu, Senangin dan beberapa jenis ikan karang lainnya hingga beberapa jenis molusca dan crustasea terdapat di WPPNRI 711.
5. Tingkat konsumsi ikan terus meningkat, seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran atas pentingnya nilai gizi, menggiring masyarakat untuk sadar mengkonsumsi ikan yang merupakan bahan pangan tinggi gizi dengan harga terjangkau, hal ini merupakan alasan yang tepat untuk tetap dioperasionalkannya Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sebagai sentra perikanan tangkap yang melaksanakan pelayanan praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan di kawasannya.
6. UPI di dalam kawasan pelabuhan. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang terdapat Unit Pengolahan Ikan yang beroperasi dalam melakukan pengolahan hasil perikanan tangkap hingga penyediaan kebutuhan operasional kapal perikanan. keberadaan UPI tidak terlepas dari keberadaan dan operasional pelabuhan perikanan, demikian pula sebaliknya, sehingga 2 komponen ini memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
7. Keberadaan lembaga keuangan makro. Disekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang telah terdapat beberapa lembaga keuangan perbankan. Keberadaan Bank menjadi indikator kemajuan ekonomi kawasan yang tentunya membuka peluang bagi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang untuk berkembang dalam hal operasionalnya, dimana tentunya perbankan menjadi salah satu sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan dan mengembangkan usaha.

Untuk memudahkan dalam mengetahui dan menganalisa lingkungan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, digunakan metode SWOT sebagai dasar analisis dan proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan faktor lingkungan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

Tabel 1 : Matriks SWOT Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

<h2>SWOT</h2>	<p>STRENGTHS (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi Strategis secara geografis • Ketersediaan Lahan • Ketersediaan Sarana dan Prasarana • Ketersediaan Perbekalan melaut • Terlindung dari Gelombang Laut • Hutan Mangrove • Lingkungan Aman dan Kondusif • Jaminan Pemasaran 	<p>WEAKNESSES (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relatif jauh dari Pusat Ekonomi Regional • Jumlah dan Kompetensi SDM • Mutu Hasil Tangkapan • Permodalan • Jumlah Pelaku Usaha • Kelembagaan Koperasi, KUB dan UMKM
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah (Pusat dan Daerah) • Program Bantuan Nelayan • Jarak ke Fishing Ground (Selat Karimata) Dekat • Potensi SDI (WPP 711) Ekosistemnya Baik • Terdapat komoditi ekonomis tinggi (Rajungan dan Udang Ronggeng/Udang Getak) • Tingkat Konsumsi Ikan Terus Meningkat • Terdapat UPI di dalam Kawasan Pelabuhan • Keberadaan Lembaga Keuangan (Bank dan Koperasi) 	<p>STRATEGI S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan Promosi PPP Teluk Batang untuk Menarik Investor • Mendorong Investasi Bidang Penangkapan Ikan dan Industri Perikanan • Fasilitasi UMKM dan Koperasi • Mendukung Program Bantuan Nelayan • Optimalisasi Sarana dan Prasarana (Ketersediaan Air Bersih, Instalasi dan Tangki BBM) Penyediaan Kebutuhan Perbekalan bagi Nelayan 	<p>STRATEGI W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Fasilitas Cold Storage • Peningkatan Jumlah dan Kompetensi SDM • Pembinaan kepada masyarakat nelayan dengan menjalankan tugas dan fungsi penyuluh perikanan • Memfasilitasi dan Menjadi Mediator antara Pelaku Usaha Perikanan dan Perbankan • Adopsi Inovasi dan Teknologi • Membangun Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan • Pembangunan Tempat Packing Produk Perikanan
<p>THREATS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan Harga BBM Tidak Stabil • Musim dan Cuaca Ekstrem • Tidak Stabilitasnya Harga Ikan • Illegal Fishing • Pertumbuhan Sektor Non Perikanan (Perkebunan) • Keberadaan Pelabuhan Tangkahan 	<p>STRATEGI S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran BBM melalui SPDN • Peningkatan Pelayanan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan dan Publikasi Informasi Klimatologi • Pembangunan Pasar Ikan Higienis • Pelayanan Prima kepada Seluruh Stake Holder • Peningkatan Pelayanan Teknis dan Pelayanan Administrasi • Peningkatan Peluang Usaha di PPP Teluk Batang 	<p>STRATEGI W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan pihak ketiga atau investor dalam pengembangan PPP Teluk Batang • Peningkatan Koordinasi Instansi/Lembaga Terkait dan Lintas Sektor

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”*

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”*.

Visi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 2020-2024

Mensinergikan Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024, secara terstruktur Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berada dibawah pengelolaan dan pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan ikut berpartisipasi dan mendukung terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang memiliki visi yang sama dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 serta visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang*

Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi

Misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

- Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- Pembinaan Ideologi Pancasila
 - Revitalisasi Revolusi Mental
 - Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
 - Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
 - Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
 - Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi
- Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- Melanjutkan Penataan Regulasi
 - Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
 - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
 - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum
 - Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
 - Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
 - Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
 - Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya
- Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
 - Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
 - Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
 - Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
 - Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Reformasi Pelayanan Publik
- Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
 - Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah

- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden dan sinergi dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

- Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Misi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Untuk mewujudkan Visi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Perikanan 2020-2024 dan Visi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 2020-2024, Maka Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang melaksanakan Misi yang bersinergi dengan Misi Presiden 2020-2024, Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024, maka Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang melaksanakan misi sebagai berikut:

- Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Peningkatan Nilai Tambah dari Penggunaan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Fasilitasi pengembangan Industri Perikanan Tangkap untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- Pemantauan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
- Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Reformasi Birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

C. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:
- a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
- Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
- Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.

- Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Tujuan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, maka tujuan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang adalah :

- Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap yang dilakukan melalui pendampingan dan fasilitasi usaha.
- Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
- Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); Pemantauan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang berkualitas, mencakup pembinaan SDM Aparatur, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

D. Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sebagai bagian dari rencana pembangunan perikanan tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024, Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Teluk Batang:

- Memfasilitasi kredit perikanan tangkap bagi Nelayan
- 2. Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Pelaksanaan kegiatan PNBP di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- 3. Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Penerapan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- 4. Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Peningkatan produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Peningkatan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Penyampaian informasi perizinan pusat-daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Penilaian Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Penilaian PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
 - Penilaian IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI,

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan kedalam 7 Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada gambar xx



Gambar 4.
Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendukung mayor project lainnya antara lain 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba, (Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, dan Morotai) dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,3 Swasta: 21,7 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 	<p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 7,2 KPBU dan Swasta: 22,8 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Gambar 5.
Major Project Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta Direktif Presiden.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)

4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
 - b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
 - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
 - d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan,

penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.

- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.

2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
 - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya

- n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Startegi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
 - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
 - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
 - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
 - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
 - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
 - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
 - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
 - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
 - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
 - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
 - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
 - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
 - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
 - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina

- t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
 - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
 - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
 - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
 - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
 - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
 - bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - b. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - c. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - e. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
 - f. Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
 - g. Pengelolaan Biofarmakologi
 - h. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - i. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - j. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - k. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - l. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif,

- bertanggungjawab dan berkelanjutan
- m. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - n. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - o. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - p. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - q. Penyadaryataan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - r. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - s. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
 - t. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - u. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indek SPBE
 - c. Level maturitas SPIP

- d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Nilai / Predikat Sakip Kementerian Kelautan dan Perikanan

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan;
- 8)

Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya

bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran

kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

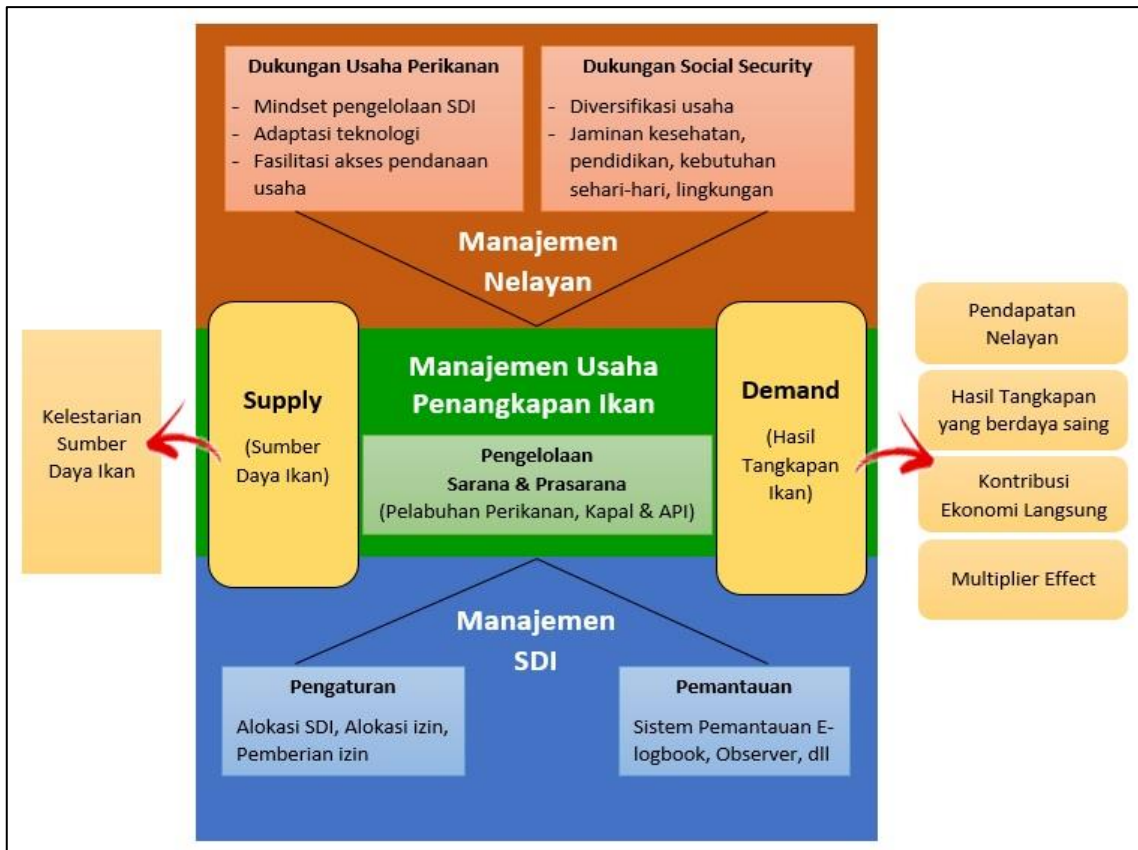
3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya

merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (Gambar 3.1). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 6.
Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 7. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

1. Kebijakan Pokok

- a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

- b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
 Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak

kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ika dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);

- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan

prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol

pemerintah;

4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;

- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.

- 4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah

awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan) maupun antara pusat-daerah (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bukan hanya

sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan

- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

- c. Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 8.
Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan

investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Tabel 2 : Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Perikanan Unggul	kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

D. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang mengacu kepada Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024 sebagai berikut:

Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan:

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Industrialisasi perikanan dan Penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas
3. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan
4. Pengembangan pelabuhan
5. Peningkatan Pendapatan, Perlindungan dan perbaikan hidup nelayan

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan faktual
2. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan
3. Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menuju birokrasi yang lebih berkualitas
4. Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang

Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1. SILAT “Sistem Informasi Izin Layanan Cepat”
2. Pemanfaatan Investasi Tuna
3. Penyederhanaan Regulasi Perikanan Tangkap
4. Pelabuhan Perikanan Unggul
5. KALAJU “Kampung Nelayan Maju”
6. Armada Perikanan yang Kompetitif

Berdasarkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diatas, Arah Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan perikanan tangkap yaitu:

1. Meningkatkan komunikasi dan harmonisasi dengan stakeholder
2. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan
 - 1) Optimalisasi produktivitas sarana prasarana penangkapan ikan
 - Mendukung program bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dengan melakukan tugas pendampingan dan pemantauan
 - Melakukan pemantauan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dan mendorong kebijakan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
 - Fasilitasi Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan
 - Peningkatan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan
 - Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
 - Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan;

- Penerapan Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan
- 2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi
- Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:
- Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
 - Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran;
 - Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
 - Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
 - Peningkatan keterpaduan dan sinergitas pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:
- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook penangkapan ikan secara nasional untuk kapal > 5 GT
 - Peningkatan produktivitas Pendaratan Ikan
 - Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.
- 4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap
- Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:
- Implementasi SILAT;
 - Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai perizinan
 - Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
 - Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;

- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap;
- 5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan
- Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:
- Mendukung dan melaksanakan program kampung nelayan maju;
 - Fasilitasi Perlindungan nelayan melalui asuransi nelayan,;
 - Fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan
 - Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan
 - Fasilitasi akses permodalan nelayan melalui program Pojok Pendanaan
 - Inisiasi dan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan
 - Peningkatan informasi kenelayanan melalui publikasi informasi iklim dan cuaca dan informasi prakiraan DPI.
3. Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang menuju birokrasi yang lebih berkualitas
- Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi dilingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang mengarah pada 9 program Reformasi Birokrasi yaitu: 1) Program Manajemen Perubahan; 2) Program Penguatan Sistem Pengawasan; 3) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Program Penguatan Kelembagaan; 5) Program Penguatan Tata laksana; 6) Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN; 7) Program Peraturan Perundang-Undangan; 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 9) Program Quick Wins. Program Reformasi Birokrasi tersebut dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.
4. Arah Kebijakan Pengarusutamaan
- 1) Pembangunan berkelanjutan
- Penerapan konsep ekonomi hijau;

- Penerapan konsep *eco fishing port*;
 - Penerapan alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan;
 - Mendukung inovasi teknologi API ramah lingkungan.
- 2) Gender
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.
- 3) Modal sosial budaya
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.
- 4) Transformasi digital
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Implementasi 4 arah kebijakan tersebut dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang melalui program yang dicanangkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan sasaran kegiatan di Pelabuhan Perikanan adalah Kegiatan Pelabuhan Perikanan Unggul yaitu Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai :

1. Pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi;
2. Pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta
3. *Eco Fishing Port*, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan

E. Kerangka Regulasi

Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang tentunya dilandasi regulasi sebagai payung hukum dan norma-norma yang harus dipatuhi baik secara internal maupun eksternal. Beberapa ketentuan peraturan perundangan yang menjadi dasar dan sekaligus instrumen dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;

Serta beberapa regulasi lainnya yang menjadi pedoman dan instrumen dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yang bersifat umum dan berlaku di Republik Indonesia.

Untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diamanatkan kepada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang diperlukan beberapa ketentuan baik berupa Peraturan maupun Keputusan yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan dalam periode waktu 2020-2024 sebagaimana terlampir.

F. Kerangka Kelembagaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dibutuhkan tatanan organisasi pelabuhan perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan telah mengatur dan menjadi instrumen Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Subseksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
2. Subseksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
3. Urusan Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subseksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; inspeksi pembongkaran ikan; bimbingan teknis; dan penerbitan Sertifikat CPIB; pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan; pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan; pemeriksaan *Log Book*; penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar; bimbingan teknis; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

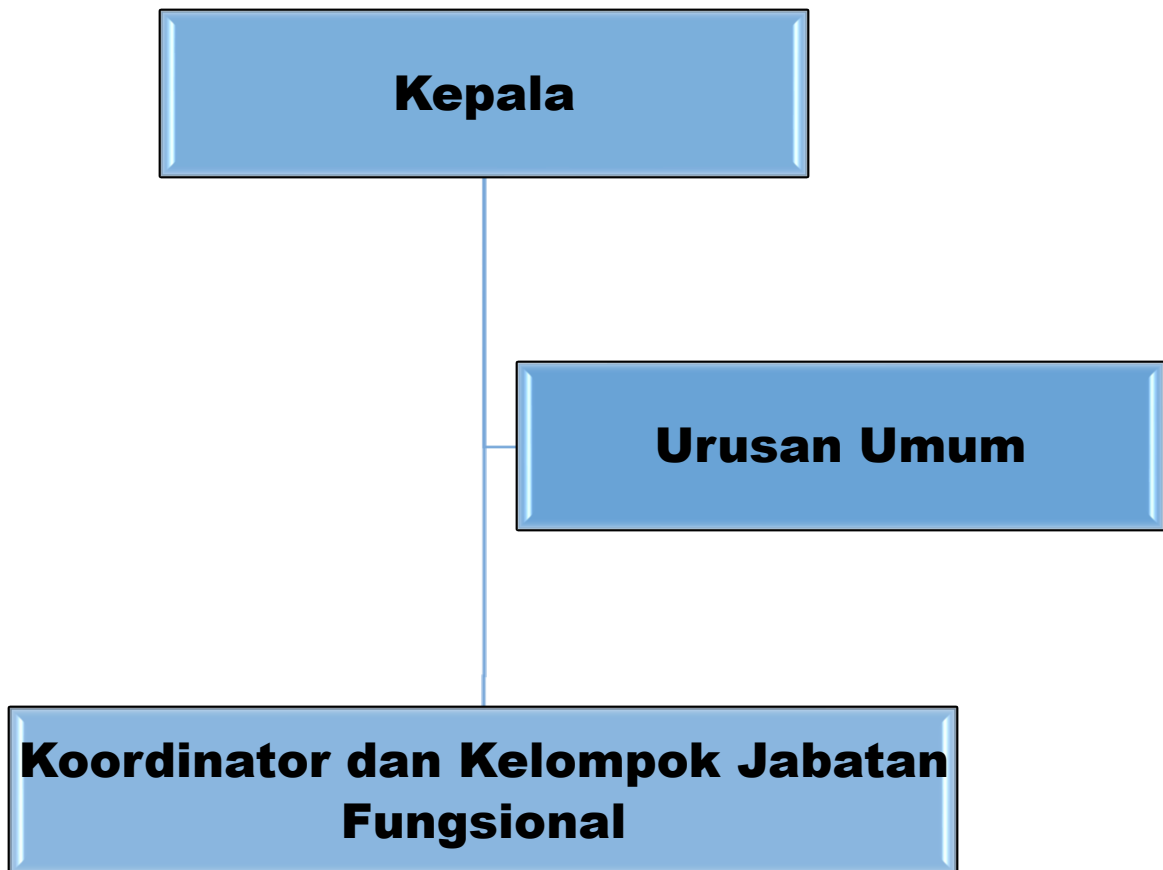
Subseksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi; pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan,

administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pengawas Perikanan, Pustakawan, Pranata Humas, Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pranata Laboratorium, dan jabatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG



Gambar 9.
Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang merupakan parameter atas pelaksanaan program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target capaian yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024. Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yaitu :

1. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah produksi perikanan tangkap di PPP Teluk Batang (Ton)
 - Nilai produksi perikanan tangkap di PPP Teluk Batang (Rp.Juta)
 - Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan PPP Teluk Batang (Rp.Juta)
2. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)
 - Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (orang)
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (orang)
 - Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (%)
 - Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nelayan)
3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang kompeten, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja:
 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (Indeks)

4. Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (%)
 - Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (%)
 - Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (%)
5. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang secara efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja:
 - Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)

Adapun uraian target kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang periode tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan proporsional yang diarahkan untuk mencapai target dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam program pengelolaan perikanan tangkap merupakan kerangka pendanaan untuk melaksanakan kegiatan diantaranya kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, kegiatan pengelolaan perizinan dan kenelayanan, kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Secara garis besar, kerangka pendanaan yang dibutuhkan adalah untuk membiaya kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dan kegiatan pengembangan dalam bentuk pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang secara umum. Kerangka pendanaan operasional dan pengembangan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik dari Rupiah Murni maupun dari dana yang berasal dari pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun kebutuhan pendanaan yang direncanakan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024 Merupakan Dokumen yang disusun dengan Mensinergikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 – 2024. Renstra ini yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

Disadari keberhasilan program-program di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang juga dihasilkan berkat adanya dukungan dari seluruh komponen di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang serta berbagai sektor terkait lainnya seperti masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

Lampiran I: Kerangka kebutuhan Regulasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2009 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	WKOPP PPP Teluk Batang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2009 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan atas WKOPP PPP Teluk Batang terkait terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035.	Direktorat Pelabuhan Perikanan dan PPP Teluk Batang	Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Perhubungan.	2021	
2.	Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai	Penyesuaian terhadap kondisi di lapangan	PPP Teluk Batang	-	2021	
3.	Perubahan Standar Pelayanan Lingkup PPP Teluk Batang	Penyesuaian terhadap kondisi di lapangan	PPP Teluk Batang	-	2021	

Lampiran II : Matriks Kinerja PPP Teluk Batang Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Teluk Batang	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (orang)	50	50	50	50	55
2	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	2	Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (Rp.)	244.987.600	245.948.100	247.098.100	247.948.000	249.810.200
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.	3	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (laporan)	10	20	20	20	25
4	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	4	Jumlah produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (ton)	520,3	786,3	825,6	908,2	971,8
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	5	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	76	76	78	80	82
7	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	7	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	30	30	30	40	40
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	1	1	3	5	10
9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	9	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	45,10	45,10	45,10	45,10	45,10
		10	IP ASN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (indeks)	72	73	73,5	74	74,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	85	85,15	85,5	86	86,5
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (Persen)	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	70	72,50	72,50	73	73
		14	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	85	86	86	86,5	86,5
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	88	89	89	90	90

Lampiran III : Kerangka Pendanaan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2020-2024

Kegiatan/Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	7.397.457.000	8.116.568.000	7.534.259.000	9.042.933.000	8.073.521.000
Output: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan							37.000.000	16.500.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000
	<i>Sasaran Kegiatan:</i>										
	Sertifikasi Kompetensi Penanganan Ikan (SKPI)	40 orang					7.000.000	-	-	-	-
	Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan			25 Produk	25 Produk	25 Produk	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Sosialisasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)	50 orang					30.000.000	-	-	-	-
	Kegiatan Sertifikasi HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta jaminan Sosial Bagi Awak Kapal Perikanan	0	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Kegiatan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	0	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	3.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Output: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							2.166.700.000	2.908.601.000	1.996.743.000	3.441.872.000	2.379.460.000
	<i>Sasaran Kegiatan:</i>										
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan						919.000.000	2.191.680.000	1.382.566.000	2.793.650.000	1.692.238.000
	Peningkatan Fasilitas PPP Teluk Batang	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	919.000.000	2.191.680.000	1.382.566.000	2.793.650.000	1.692.238.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	659.300.000	1.544.690.000	1.382.566.000	2.793.650.000	1.692.238.000
	Pengadaan Alat Pengolah Data	4 unit	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	39.300.000	95.700.000	45.000.000	90.000.000	90.000.000
	Reparasi Peralatan dan Mesin	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	309.460.000	500.000.000	0	0	0
	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	310.540.000	948.990.000	1.173.786.000	2.703.650.000	1.602.238.000
	Peralatan Pasca Produksi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	310.540.000	948.990.000	163.780.000	0	0
	Layanan Penerbitan SHTI		10 produk	10 produk	10 produk	10 produk	8.560.000	10.000.000	17.460.000	17.460.000	17.460.000
	Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	54.700.000	127.700.000	94.533.000	101.000.000	108.000.000
	Layanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	49.800.000	61.195.000	61.433.000	65.000.000	70.000.000
	Operasional dan Pelayanan TPI Higienis		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		32.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000
	Penerapan Standar Pelayanan Publik		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	4.900.000	11.700.000	29.100.000	30.000.000	32.000.000

Kegiatan/Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB)		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	27.760.000	27.760.000	19.602.000	17.542.000	15.542.000
	Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional		1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	497.380.000	541.461.000	410.582.000	440.220.000	474.220.000
	Pengelolaan dan Operasional Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	19.380.000	20.730.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	19.680.000	25.740.000	18.220.000	18.220.000	18.220.000
	Pengelolaan dan Operasional ISO di Pelabuhan Perikanan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		25.600.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000
	Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPNP		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	88.160.000	78.431.000	129.946.000	130.000.000	132.000.000
	Pengembangan dan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	23.760.000	23.760.000	74.276.000	75.000.000	80.000.000
	Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.200.000	8.000.000	9.880.000	10.000.000	10.000.000
	Publikasi dan Promosi PPP Teluk Batang		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	73.500.000	67.600.000	38.700.000	50.000.000	60.000.000
	Inspeksi Pembongkaran Ikan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11.300.000	12.000.000	7.940.000	10.000.000	12.000.000
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	18.300.000	20.000.000	19.000.000	25.000.000	25.000.000
	Operasional Pelayanan Jasa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.640.000	110.000.000	19.700.000	25.000.000	30.000.000
	Operasional Pelaksanaan K5	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	32.900.000	35.000.000	45.920.000	50.000.000	60.000.000
	Tata Kelola dan Operasional Pendataan PNBPNP Pasca Produksi		1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	497.380.000	541.461.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Output: Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan							47.074.000	47.074.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Sasaran Kegiatan:										
	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap						4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1 provinsi	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Output: Pengelolaan Sumber Daya Ikan							60.040.000	28.550.000	29.620.000	32.000.000	35.000.000
	Sasaran Kegiatan:										
	Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan	0	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	-	28.550.000	29.620.000	32.000.000	35.000.000
Output: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap							5.086.643.000	5.115.843.000	5.417.896.000	5.479.061.000	5.569.061.000
	Sasaran Kegiatan:										
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	5.086.643.000	5.115.843.000	5.417.896.000	5.479.061.000	5.569.061.000

Kegiatan/Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	[Base Line]										
	Layanan Perkantoran		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	4.853.543.000	4.853.543.000	5.059.176.000	5.049.061.000	5.074.061.000
	Gaji dan Tunjangan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	2.253.543.000	2.253.543.000	2.314.176.000	2.314.176.000	2.314.176.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.439.092.000	1.624.961.000	1.664.885.000	1.664.885.000	1.664.885.000
	Langganan Daya dan Jasa		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	283.200.000	271.200.000	233.329.000	240.000.000	240.000.000
	Pemeliharaan Kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	604.925.000	454.405.000	530.586.000	550.000.000	570.000.000
	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	272.783.000	300.061.300	271.154.000	280.000.000	285.000.000
	Penanggulangan dan Pengendalian Covid-19		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	272.783.000	300.061.300	45.046.000	0	0
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	74.800.000	74.800.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000
	Layanan SDM		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	37.000.000	40.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	23.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000	45.000.000
	Layanan Data dan Informasi		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	17.300.000	10.000.000	18.000.000	25.000.000	30.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	81.000.000	112.500.000	180.720.000	205.000.000	250.000.000
	Laporan Program dan Kegiatan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		31.500.000	39.000.000	45.000.000	50.000.000
	Laporan Keuangan dan BMN		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47.400.000	47.720.000	109.380.000	120.000.000	150.000.000
	Laporan Keuangan dan BMN (OPNAME Penghapusan Barang)		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.640.000	7.340.000	6.780.000	10.000.000	15.000.000
	Laporan Keuangan dan BMN (Koordinasi dan Konsolidasi Pusat dan Daerah)		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	25.960.000	25.940.000	25.560.000	30.000.000	35.000.000